

Ketua Panja SDGs: Turisme, perdagangan dan kesehatan perlu dikelola terpadu

Ketua Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Panja SDGs) Dr Nurhayati Ali Assegaf menegaskan bahwa sektor turisme, perdagangan dan kesehatan perlu dikelola secara terpadu. Ini dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul dari ketiga sector tersebut. Ini juga sejalan dengan konsep *one health* yang menegaskan bahwa aspek kesehatan harus ditangani secara terpadu dan lintas-sektoral.

“Turisme menciptakan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan perdagangan. Nilai total perdagangan Indonesia pada 2015 mencapai US\$ 292,9 miliar. Tetapi aktivitas dari keduanya bersifat *mobile* sehingga dapat secara signifikan mengubah dan menyebarkan wabah penyakit menular,” urai Nurhayati saat menjadi panelis dalam Konferensi WHO *Advancing Global Health Security: From Commitments to Actions*, di Nusa Dua Bali, Selasa, (28/6).

Berdasarkan pengalamannya saat memimpin Panja MDGs—yang saat ini diteruskan menjadi Panja SDGs—aspek kesehatan memang berpotensi memengaruhi wisatawan. Untuk itu, Panja MDGs focus pada isu-isu kesehatan. Salah satu hasil dari kajian Panja MDGs dalam aspek kesehatan adalah pentingnya penguatan pemahaman publik maupun Negara. Dan langkah tersebut memerlukan peran kuat dari parlemen. “Parlemen adalah figur politik terpilih dan berpengaruh di konstituen mereka. Sehingga perlu ambil bagian dalam memperkuat pemahaman publik akan kesehatan,” jelasnya.

Ia menjelaskan dengan globalisasi saat ini, beragam isu wabah penyakit dapat dengan mudah diketahui dan itu menuntut aspek kesiapsiagaan yang tinggi bagi perangkat Negara. Semisal saat kasus MERS Coronavirus (CoV) yang terjadi di sejumlah Negara termasuk Korea Selatan tahun lalu, kewaspadaan Indonesia harus dalam tingkat yang tinggi. “Jutaan rakyat kita bepergian ke kawasan Timur Tengah untuk bekerja, Haji/Umroh, belajar dan wisata,” terang Nurhayati yang juga Ketua BKSAP ini.

Lebih jauh, ia menerangkan, dalam segala fungsinya, parlemen berperan penting dalam konteks membangun Agenda Keamanan Kesehatan Global (*Global Health Security Agenda/GHSA*) yang juga menuntut kolaborasi multi-sektor. Dalam hal anggaran, Parlemen membahas rancangan anggaran untuk kesehatan. “Untuk Indonesia, sesuai rekomendasi yang terus menerus dari Panja MDGs, Indonesia telah mengalokasikan 5% dari total anggaran Negara untuk sektor kesehatan. Promosi kesehatan dan aspek pencegahan penyakit harus menjadi program prioritas dari sektor ini,” saran dia.

Konferensi WHO tersebut digelar untuk membahas beragam mekanisme lanjutan pasca pertemuan WHO di Cape-Town 2015, ketika wabah Ebola menyeruak. Konferensi juga memperkenalkan upaya-upaya evaluasi bersama dan yang dilakukan oleh pihak luar (*Joint External Evaluation*) dalam upaya kesiapsiagaan kesehatan. Konferensi juga lebih jauh

memperkenalkan strategi *one health*, untuk keterpaduan penanganan kesehatan lintas-sektoral. Sejumlah pakar kesehatan, praktisi WHO, hingga perwakilan dari 52 negara menghadiri konferensi yang dibuka oleh Menkes Republik Indonesia, Prof Nina Moeloek ini.